

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung. Jakarta
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- , 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Raja Grafindo. Jakarta
- , 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta
- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar
- , Abd. Asis, Amir Ilyas. 2021. *Hukum Acara Pidana*, Kencana. Jakarta
- Andi Hamzah & Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*. Akademika Persindo. Jakarta
- , 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- , 1993. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Universitas Diponegoro. Semarang
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia. Bandung
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Deddy Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- , 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta
- E. Utrecht. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Universitas Padjajaran. Bandung
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- , 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persadaa. Tangerang

- I Ketut Mertha dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Udayana. Bali
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum*. Presnamedia Group. Jakarta
- K. Wantjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis Praktik Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditnya Bakti. Bandung
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta
- M.H Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco. Jakarta
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Masruchin Ruba’i dkk. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. Malang
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Armico. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana I*, Alumni. Bandung
- , 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- , 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- , 2019. *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya. Makalah dalam Seminar Nasional “Suap Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Napitulu Diana. 2010. *KPK in Action*. Raih Asa Sukses. Jakarta

- Nicolas Simajuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Ninieck Suparni. 2002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- , 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta
- Pudi Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalitas dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama. Surabaya
- R.A. Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Sumur. Bandung
- R. Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya. Bandung
- J.E. Sahetapy. 1982. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Rajawali Pers. Jakarta
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soedarto. 1974. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro. Semarang

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Diponegoro. Semarang

----- . 1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta

Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Jakarta

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Tonggat. 2003. *Hukum Pidana Materill*. UMM Press. Malang

Tri Astuti Handayani. 2018. *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Nusa Media. Bandung

JURNAL

A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto. 2022. "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Buleleng". Jurnal Komunikasi Yustitia. Vol 5 No. 2

Andhika Wiratama dan Eko Prasajo. 2019. "Merit System dalam Mekanisme Rekrutment dan Seleksi Bintara POLRI". Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol. 13 No, 2

- Bagus Setiyono. 2017. *“Suatu Tinjauan Tentang Proses Rekrutment Anggota POLRI Polda Sulawesi Tengah Yang Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (Betah) Kearah Kelestarian Governans”*. Asian Journal of Environment. Vol. 1 No. 1
- Ida Bagus Kade Danendra. 2019. *“Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol. 5 No. 2
- Juwita Kusumadewi. 2022. *“Proses Rekrutment Bintara POLRI di Polresta Malang Kota Dalam Perspektif Good Governance”*. Jurnal Kawruh Abiyasa. Vol. 2 No. 2
- Mohammad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, Attie Oliy. 2021. *“Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional”*. Lex Crimen. Vol. 10 No. 5
- Ni Luh Putu Vina Austriani, dkk. 2020. *“Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir POLRI dalam Perspektif Governance (Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali Tahun Anggaran 2015)”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhammad Yusuf, Nova Riyanti. 2021. *“Optimalisasi Pelaksanaan Rekrutment Bintara POLRI di Provinsi Kalimantan Tengah”*. Jurnal Pencerah Publik. Vol. 8 No. 2
- Ramadhan Tabiu, Heryanti, Sahrina Safiuddin. *“Asas-Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional”*. 2021 Vol. 5 No. 2
- Syarif Saddam Rivanie dkk. 2022. *“Perkembangan Teori-Teori Tujuan Penelitian”*. Jurnal Halu Oleo Law Review. Vol. 6 No. 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1980 Nomor 11)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597)

WEBSITE

Antara News, 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/2931521/jaksa-dakwa-pasal-berlapis-perwira-polisi-di-sumsel-kasus-gratifikasi>, diakses pada tanggal 29 januari 2023 pukul 17.20

Antara Sulteng, 2022, <https://sulteng.antarane.ws.com/berita/257241/oknum-polisi-penerima-gratifikasi-rp44-miliar-dituntut-ptdh>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 16.54

Kementerian Keuangan RI. 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/datapublikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 21.30

Struktur Organisasi POLRI. 2023. <https://humas.POLRI.go.id/profil.struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 22.57